

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DI SUMATERA UTARA**

Renova Marpaung

Abstrak

Implementasi manajemen mutu dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam tujuh program, yaitu: program PAUD, program Pendidikan WAJAR 9 tahun, program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Tinggi, program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan program manajemen pelayanan mutu.

Kata Kunci : Manajemen Mutu, Pembangunan, Pendidikan

A. Pendahuluan

Mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003, tujuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan bagi setiap anak bangsa agar terbentuk masyarakat seutuhnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyusun sebuah rencana strategis.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berada dalam perspektif nasional dan daerah sekaligus dalam perspektif internasional. Dalam Perspektif nasional, Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara adalah pelaksana kebijakan-kebijakan nasional di daerah. Dalam perspektif daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah pelaksana kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam perspektif internasional, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada perkembangan arus globalisasi yang bersifat tanpa tapal batas (*borderless*). Oleh karena itu, Rencana strategis

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional dan arah kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kecenderungan globalisasi yang terjadi.

Implementasi program peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara harus mengacu pada rencana strategis yang juga memuat visi, misi, tujuan, kebijakan strategis, kegiatan pokok, rencana pendidikan jangka menengah, pembiayaan, dan indikator keberhasilan. Oleh karena itu, implementasi program peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan melalui pembahasan mulai dari pemahaman tentang hakikat pendidikan, pemahaman tentang UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 agar dapat diprediksi keadaan kehidupan di masa yang akan datang baik di Provinsi Sumatera Utara, di Indonesia, maupun di Dunia internasional.

Dalam upaya pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus menerapkan manajemen mutu. Manajemen mutu adalah perencanaan, pengorganisasian, implementasi rencana, dan pengendalian program berbasis mutu. Pembangunan pendidikan yang bermutu adalah proses dan hasil pembangunan tersebut memiliki ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kebutuhan stakeholder.

B. Visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki visi sebagai berikut: “terwujudnya pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang bermutu, mandiri dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan visi ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Memiliki misi sebagai berikut: (Pasaribu, 2008)

1. Menuntaskan wajib belajar pendidikan 9 tahun dengan standar mutu yang ditetapkan.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional secara berimbang.
3. Menghasilkan lulusan kejuruan yang memiliki daya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
4. Meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan relevan dengan dunia pembangunan lainnya.
6. Meningkatkan mutu manajemen dan perencanaan pembangunan pendidikan.
7. Memutakhirkan kurikulum sesuai kebutuhan global, nasional, dan regional.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
9. Meningkatkan penataan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

C. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, yaitu:

- a. Menyediakan sekolah dan ruang sekolah yang cukup agar seluruh anak bangsa, khususnya wajar 9 tahun dapat memperoleh pendidikan yang layak.
 - b. Memberi perhatian yang lebih kepada daerah yang kurang mampu untuk memberikan motivasi guna pemerataan.
 - c. Memberi perhatian yang lebih kepada pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil dan pendidikan luar biasa.
 - d. Mengupayakan percepatan sekolah kejuruan.
2. Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing
- a. Meningkatkan kemampuan dan modernisasi agar peserta didik mencapai setidaknya standar minimal nasional, melalui peningkatan mutu lulusan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, dukungan terhadap implementasi standar nasional pendidikan, serta pengembangan dan penerapan strategi untuk membangun infrastruktur yang mendukung implementasi dan penguatan kurikulum yang berbasis standar nasional pendidikan.
 - b. Peningkatan dukungan terhadap sistem pembelajaran, yaitu terhadap penciptaan suatu master plan pendidikan anak-anak, serta membantu dan mencari sumber daya untuk program seperti itu, menyediakan sumber daya dan pedoman untuk menjamin bahwa semua peserta didik menghadiri ruang belajar dan sekolah yang aman, bebas narkoba dan sehat, membantu satuan pembelajaran dalam menemukan dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, kurikulum mutakhir, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan setelah sekolah, mengembangkan dan mendukung rencana untuk

mengimplementasikan program-program pendukung pembelajaran komprehensif, mempromosikan penggunaan satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian prestasi akademik, sosial dan emosional, mengembangkan perpustakaan, dan lain-lain.

- c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan dan perbaikan sistem pengembangan pendidik/guru dan tenaga kependidikan formal dan non-formal agar cemerlang dalam pembelajaran.
 - d. Peningkatan dana pendidikan.
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- a. Peningkatan dan penguatan tatakelola, yaitu dengan membangun tata kelola untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan pencitraan Publik (*image building*) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan satuan pendidikan yang berada di bawahnya.
 - b. Peningkatan akuntabilitas Publik dan pencitraan Publik dengan membangun sistem untuk meningkatkan akuntabilitas Publik terhadap capaian peserta didik
 - c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

D. Program Peningkatan Mutu Pendidikan di Sumatera Utara

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Pasal 56 menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan

evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan yang berperan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan (UU No. 20 tahun 2003).

Lebih lanjut Pardede (2007) mengatakan bahwa Dewan Pendidikan diharapkan dapat menciptakan pola pembangunan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Dengan demikian peranan masyarakat dalam pengendalian mutu penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan implementasi manajemen mutu pendidikan, Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara memiliki tujuh program; yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Tinggi
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Implementasi program pendidikan anak usia dini bertujuan agar semua anak usia dini (di bawah umur 7 tahun) baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya serta sesuai tahap-tahap perkembangan atau usia mereka. PAUD juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu

pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti TK, Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, serta jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Implementasi peningkatan mutu dalam program anak usia dini ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana/prasarana PAUD dengan melengkapi:
 - a. Ruang bermain
 - b. Alat bermain
 - c. Buku-buku dan bahan ajar lainnya
2. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran yang sesuai dengan:
 - a. Tahap-tahap perkembangan anak didik
 - b. Perkembangan ilmu pengetahuan
 - c. Perkembangan budaya dan seni.
3. Subsidi block grant dan imbal swadaya untuk peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya penyelenggara dan satuan PAUD, agar dapat meningkatkan kemampuan manajemen secara efektif dan efisien, sehingga mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Implementasi program wajib belajar pendidikan 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan dikdas yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal, maupun yang mencakup sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) PNF kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, serta SM dan MT/SMP terbuka, dan pendidikan non formal kesetaraan SMP atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7-12 tahun baik

anak laki-laki maupun perempuan, dan anak yang memerlukan perhatian khusus dalam memperoleh pendidikan setidaknya-tidaknya sampai SMP sederajat.

Implementasi program peningkatan mutu pendidikan dalam program wajib belajar pendidikan 9 tahun dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan mutu SD/MI, SDLB, SMP/MTS dengan:
 - a. Pengembangan kurikulum sesuai kompetensi siswa, karakteristik daerah, perkembangan iptek, dinamika perkembangan global, dan budaya
 - b. Penerapan metode pembelajaran sesuai kondisi yang ada
 - c. Menggunakan sistem penilaian yang tepat dan transparan.
2. Pemberian bantuan dalam berbagai bentuk; seperti:
 - a. Bantuan beasiswa
 - b. Block grant
 - c. Imbal swadaya
 - d. Dan bantuan dalam bentuk lainnya.
3. Penyediaan sarana dan bahan ajar seperti:
 - a. Perpustakaan dan buku-buku pelajaran
 - b. Media pembelajaran dan alat peraga sesuai kebutuhan, dan
 - c. Laboratorium bahasa, IPA, dan matematika
4. Pendirian sekolah bertaraf internasional.
5. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas pada jenjang dikdas yang memuat kecakapan dasar (basic learning contents) yang mencakup:
 - a. Kecakapan berkomunikasi (membaca, menulis, mendengarkan, dan mengemukakan pendapat)
 - b. Kecakapan intrapersonal (pemahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri, dan tanggung jawab)

- c. Kecakapan interpersonal (bersosialisasi, bekerja sama, mempengaruhi/mengarahkan orang lain, dan bernegosiasi), dan
- d. Kecakapan mengambil keputusan (memahami masalah, merencanakan, menganalisis, dan memecahkan masalah).

Implementasi program pendidikan menengah bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk usia sekolah menengah, baik laki-laki maupun perempuan melalui pendidikan formal: SMA, SMK, MA, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat.

Implementasi program peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan menengah dilaksanakan melalui.

1. Penyediaan berbagai bentuk beasiswa; seperti:
 - a. Beasiswa bagi siswa yang kurang mampu
 - b. Beasiswa berprestasi melalui kompetisi-kompetisi seperti Olimpiade sains dan matematika untuk SMA
 - c. Untuk SMK promosi keterampilan siswa (PKS) tingkat nasional, *Asian Skill Competition* (ASC) tingkat regional, dan *World Skill Competition* (WSC) tingkat internasional
2. Penyediaan sarana dan prasarana baik untuk SMA/MA dan SMK; seperti:
 - a. Perpustakaan dan buku-buku pelajaran sesuai kebutuhan
 - b. Laboratorium dan sarana komputer
 - c. Ruang multi media dan media pembelajaran.
3. Pembinaan minat, Bakau, dan kreativitas melalui pembelajaran yang efektif dan efisien yang menekankan pada kecakapan akademik dan kecakapan hidup.
4. Pendirian sekolah bertaraf internasional, dalam hal ini:

- a. Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan daerah untuk pengembangan keunggulan local
- b. Bekerja sama dengan luar negeri dalam pengembangan kurikulum agar lulusan dapat berkompetisi secara global
- c. Mendorong sekolah untuk memperoleh sertifikat ISO.

Implementasi program pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan pendidikan tinggi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Implementasi program peningkatan mutu pendidikan melalui program pendidikan tinggi dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pengembangan politeknik berdasarkan keunggulan lokal dan internasional
2. Mengadakan pelatihan bagi dosen-dosen; seperti:
 - a. Tentang pengembangan dan pemilihan metode/strategi pembelajaran
 - b. Metodologi penelitian.
3. Penyediaan sarana dan prasarana; seperti:
 - a. Penyediaan buku-buku pelajaran
 - b. Laboratorium dan sarana praktek keterampilan hidup dan akademik sesuai kebutuhan.
4. Akselerasi jumlah program studi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk:
 - a. Meningkatkan kompetensi pengembangan dan pemanfaatan iptek
 - b. Penataan proposisi bidang ilmu IPA:IPS/Humaniora agar sebanding.

5. Peningkatan jumlah mutu publikasi ilmiah; seperti:
 - a. Penelitian dan HAKI yang hasilnya diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional
 - b. Penulisan buku yang diharapkan memiliki ISBN.

Implementasi program pendidikan non-formal bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui pendidikan formal.

Implementasi program peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan non formal dilaksanakan dengan:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal seperti:
 - a. Lembaga kursus dan pelatihan
 - b. Pendidikan keterampilan/kecakapan hidup.
2. Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan melalui:
 - a. Pengembangan media dan teknologi pendidikan, serta alat peraga
 - b. Penyediaan buku pelajaran dan buku bacaan, serta materi pelajaran yang memanfaatkan ICT (seperti: radio, televisi, komputer dan internet)
3. Penyediaan bantuan beasiswa Magang kelompok belajar usaha (KBU), pemberian biaya operasional dapat dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan magang
 - b. Penyelenggaraan kursus sesuai kebutuhan
 - c. Pemberian beasiswa.
4. Pengadaan diklat fungsional pamong belajar dan tenaga penilik tentang:
 - a. Pengembangan bahan ajar sesuai kebutuhan

- b. Pengembangan model-model pembelajaran sesuai kondisi yang ada.
5. Peningkatan kompetensi tenaga teknis pendidikan non formal agar dapat menciptakan model-model unggulan dan model kompetitif PNF dalam PAUD, kesetaraan, keaksaraan, dan kecakapan hidup.

Implementasi program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensi melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Implementasi program peningkatan mutu dalam program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan:

1. Penyiapan guru untuk pemenuhan kualifikasi, uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan renumerasi. Oleh karena itu perlu dilakukan:
 - a. Pemetaan kompetensi secara periodik
 - b. Pendidikan berkelanjutan untuk mencapai standar kompetensi yang ditunjukkan oleh uji kompetensi
 - c. Penghitungan angka kredit sebagai tenaga fungsional, dan
 - d. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif profesi guru dan pamong belajar untuk menunjang mutu pembelajaran.
2. Penggalangan kerja sama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan sertifikasi.
3. Pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

4. Peningkatan pemerolehan penghargaan dan perlindungan hasil kekayaan intelektual, yaitu dengan adanya upaya:
 - a. Penyusunan sistem dan mekanisme perlindungan dalam menjalankan profesi dan kesejahteraan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Pemberian penghargaan kepada guru dan pamong belajar yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa.
5. Pengembangan model-model pembelajaran, bahan ajar, multimedia, dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh.

Implementasi program manajemen pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan tatakelola pendidikan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan peningkatan kualitas dan efisiensi manajemen melalui penggunaan ICT, pengembangan sistem manajemen operasional menuju standarisasi dan jaminan mutu, peningkatan sistem assessment, monitoring dan evaluasi program pembangunan pendidikan, Penyusunan rencana program pembangunan secara terpadu dalam bidang pendidikan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

E. Penutup

Berdasarkan implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Utara mengacu pada tujuh program pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

1. Implementasi manajemen mutu dalam program anak usia dini; yaitu:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana PAUD

- b. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran
 - c. Subsidi block grant dan imbal swadaya untuk peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya penyelenggara dan satuan PUD
2. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan wajar pendidikan 9 tahun dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Peningkatan mutu SD/MI, SDLB, SMP/MTS dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi
 - b. Pemberian bantuan beasiswa, block grant, dan imbal swadaya
 - c. Penyediaan sarana dan bahan ajar
 - d. Pendirian sekolah bertaraf internasional, dan
 - e. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas.
3. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan menengah; yaitu melalui:
- a. Penyediaan beasiswa
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Pendirian sekolah bertaraf internasional.
4. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan tinggi; yaitu melalui:
- a. Pengembangan politeknik berdasarkan keunggulan lokal dan internasional
 - b. Mengadakan pelatihan bagi dosen-dosen
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan tinggi
 - d. Akselerasi jumlah program studi.

- e. Peningkatan jumlah mutu publikasi ilmiah, buku ajar, dan penelitian.
5. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program pendidikan non formal; yaitu melalui:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan
 - c. Pemberian beasiswa Magang kelompok belajar usaha (KBU)
 - d. Mengadakan diklat fungsional pamong belajar dan tenaga pendidik, dan
 - e. Peningkatan kualitas tenaga teknis.
6. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; yaitu melalui:
 - a. Penyiapan guru untuk pemenuhan kualifikasi, uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan renumerasi
 - b. Penggalangan kerja sama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan sertifikasi
 - c. Mengadakan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Peningkatan pemerolehan penghargaan dan perlindungan hasil kekayaan intelektual
 - e. Pengembangan model-model pembelajaran, bahan ajar, multi media dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh.
7. Implementasi manajemen mutu dalam peningkatan mutu pendidikan dalam program manajemen pelayanan pendidikan; yaitu melalui:
 - a. Peningkatan tatakelola pendidikan melalui penggunaan ICT
 - b. Peningkatan kualitas dan efisiensi manajemen data melalui penggunaan ICT

- c. Pengembangan sistem manajemen operasional menuju standarisasi dan jaminan mutu
- d. Peningkatan sistem assessment, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pendidikan.
- e. Penyusunan rencana program pembangunan secara terpadu dalam bidang pendidikan, dan
- f. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

F. Daftar Pustaka

Pasaribu Delta. 2008. *Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Disdiksu

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas

Pardede Rudolf. 2007. Sambutan Gubernur Sumatera Utara dalam Rangka Pembukaan cara Rapat Kerja Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Minggu tanggal 04 November 2007 di Sumatera Village Medan.